



Peningkatan Sektor Pertanian Dalam Mendukung Program Makan Bergizi Gratis Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Oleh :

M. Arliyan Syahrial, M.Pd,
Dr. Muhammad Nur, S.Pi., M.S,
Ary Wibawa, S.AP., M.AP,
Hairul Ikhwan, S.Hut,
Yunita Anggeriana, S.Hut.
Dicky Maulana, S.Kom.
Muhammad Rifqian Nafi, A.Md.T.

PENDAHULUAN

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang berkontribusi besar pada perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor ini tercatat mencapai 19,78% dari total PDRB Kab. HSS Tahun 2024 (BPS Kab. HSS, 2025). Selain berkontribusi pada perekonomian, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (selanjutnya disebut Sektor Pertanian) juga memiliki peran penting terhadap ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat. Sektor ini menghasilkan produk pangan seperti beras, umbi-umbian, kacang-kacangan, ikan, ternak, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program MBG merupakan program strategis nasional yang dicanangkan sejak tanggal 6 Januari 2025 bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan Generasi Emas 2045. Target sasaran Program MBG secara nasional yaitu sebanyak 82,9 Juta penerima manfaat, terdiri dari balita usia lebih dari 6 bulan s.d 5 tahun, ibu hamil, ibu menyusui, peserta didik dari PAUD/TK sampai dengan SMA/ sederajat yang berusia maksimal 18 tahun, termasuk kelompok lainnya yang mencakup pendidik dan tenaga kependidikan (Perpres Nomor 115 Tahun 2025).

Target sasaran Program MBG di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebanyak 66.000 penerima manfaat (<https://kalsel.antaranews.com>). Dengan jumlah penduduk mencapai 238.413 jiwa (BPS Kab. HSS, 2025), target sasaran Program MBG mencapai 27,58% dari total populasi penduduk. Pada tahun-tahun mendatang, sasaran penerima manfaat MBG diestimasikan meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk, yang juga berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan, termasuk untuk Program MBG.

Selain untuk peningkatan gizi masyarakat, Program MBG juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian melalui rantai pasok penyediaan bahan baku. Dalam

Ringkasan

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumberdaya yang besar pada sektor pertanian termasuk sumberdaya pangan sehingga dapat mendukung Program MBG. Produk pangan yang tersedia didominasi padi dan ubi jalar yang merupakan sumber karbohidrat, itik dan ikan rawa/sungai sebagai sumber protein, serta berbagai produk hortikultura sebagai sumber vitamin, mineral dan serat.

Meskipun produk lokal tersedia melimpah, tapi tidak sepenuhnya optimal dimanfaatkan dalam Program MBG. Permasalahan yang dihadapi yaitu belum adanya regulasi penggunaan produk lokal, skala produksi kecil, kualitas tidak standar, belum optimalnya pengolahan dan diversifikasi produk, status kelembagaan petani, dan kemitraan dengan stakeholder terkait. Rekomendasi kebijakan yang dapat diambil yaitu pembuatan regulasi yang terkait dengan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan baku MBG, konsolidasi komoditas yang diproduksi, fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan, pengembangan dan diversifikasi produk olahan, peningkatan status kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan, serta peningkatan kemitraan kelembagaan petani/nelayan/ pembudidaya ikan dengan stakeholder terkait.

Adanya peningkatan di sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah yang merupakan perwujudan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yang memfokuskan penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi inklusif.

penyediaan bahan baku MBG, bahan-bahan yang digunakan dihimbau menggunakan produk yang dihasilkan oleh petani/peternak setempat (Perpres Nomor 115 Tahun 2025). Dengan adanya pemanfaatan sumberdaya lokal ini, Program MBG diharapkan dapat menyerap secara optimal produk lokal sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani/peternak/pembudidaya ikan/nelayan setempat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki potensi sumberdaya pangan lokal yang besar dan beragam tersebar pada subsektor pertanian dan perikanan. Produksi pada subsektor pertanian didominasi komoditas tanaman pangan seperti padi, ubi jalar, dan ubi kayu, beragam sayur dan buah seperti cabai, terong, tomat, pisang, dan semangka, hasil peternakan berupa sapi, kerbau, kambing, ayam pedaging, ayam petelur, itik dan telur, serta tanaman perkebunan terutama kelapa dalam. Produksi pada subsektor perikanan dihasilkan dari kegiatan penangkapan ikan di perairan umum dan budidaya air tawar (BPS Kab. HSS, 2025). Jenis-jenis ikan yang diproduksi dari kegiatan penangkapan didominasi jenis ikan toman/gabus, sepat siam, dan betok, sedangkan dari kegiatan budidaya didominasi ikan patin, toman, gabus, nila, lele, mas, dan betok (<https://portaldata.kkp.go.id>). Selain data di atas, Kabupaten HSS juga menghasilkan komoditas lokal lainnya, yaitu kacang tunggak (kacang Nagara), labu kuning (labu Juai), talas (talas Loksado), jewawut (ikur-ikur), sagu, sukun, aren (Brida Prov. Kalsel, 2024), dan jamur (Brida Prov. Kalsel, 2025). Produk-produk tersebut merupakan sumberdaya pertanian pangan lokal yang selama ini telah dibudidayakan dan dimanfaatkan sebagai sumber pangan oleh masyarakat setempat.

Potensi produksi yang besar dan beragam ini memberikan kontribusi yang besar terhadap tingkat ketersediaan pangan. Berdasarkan hasil penilaian Bapanas pada tahun 2025, Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki nilai indeks ketahanan pangan yang tinggi yaitu sebesar 85,67 dengan kategori sangat tahan. Dari 3 pilar ketahanan pangan, kontribusi terbesar berasal dari pilar ketersediaan dengan skor 96,08 diikuti pilar keterjangkauan dengan skor 84,74, dan paling rendah dari pilar pemanfaatan dengan skor 76,17 (Bapanas, 2025). Tingginya skor ketersediaan pangan ini mengindikasikan bahwa sumberdaya pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersedia dan berpotensi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan bahan pangan dan gizi untuk mendukung program MBG.

Meskipun tersedia melimpah, produk lokal dari sektor pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya dapat mendukung program MBG, karena terdapat sejumlah syarat dan ketentuan diantaranya tersedia dalam volume besar, kualitas baik, dan harga yang terjangkau. Policy brief ini mengulas secara singkat kondisi sektor pertanian dalam mendukung program MBG di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, permasalahan utama yang dihadapi, serta usulan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Visi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029 yaitu “Membangun Desa, Menata Kota, Mewujudkan Hulu Sungai Selatan Sejahtera, Mandiri, Agamis, Mengayomi, dan Teknologis (SEMANGAT)” dengan fokus pembangunan ekonomi pada kawasan pedesaan. Adanya Program MBG yang didukung penguatan pada sektor pertanian diharapkan mempercepat capaian visi RPJMD khususnya dalam penguatan desa sebagai basis pertumbuhan ekonomi inklusif.

DESKRIPSI MASALAH

1. Belum ada regulasi yang secara spesifik mewajibkan pengelola MBG membeli produk petani lokal. Regulasi yang ada saat ini hanya dalam bentuk himbauan untuk mengutamakan produk lokal. Hal ini berdampak tidak optimalnya penyerapan produk petani lokal.
2. Sebagian produk pertanian lokal diproduksi dalam skala kecil (Brida Prov. Kalsel, 2025), harga berfluktuasi (Estiningtyas et al, 2024; Rais et el, 2018), mudah rusak (FAO,)2020; 2011, atau tidak aman dikonsumsi utuh seperti jenis ikan yang memiliki banyak duri/tulang halus (Burnawi, 2009) sehingga berpotensi tidak memenuhi kriteria Program MBG.
3. Belum optimalnya pengolahan produk pertanian (teknologi sederhana dan skala kecil sehingga kurang efisien, kurangnya keanekaragaman produk olahan, dan masih rendahnya preferensi masyarakat terhadap produk olahan pangan lokal (Brida Prov. Kalsel, 2024).
4. Belum optimalnya status kelembagaan petani dan kemitraan dengan stakeholder terkait (Brida Prov. Kalsel, 2025).

KEBIJAKAN YANG DISASAR

1. Diperlukan adanya regulasi yang mengatur penggunaan produk petani/nelayan lokal oleh SPPG.
2. Diperlukan konsolidasi petani dalam penentuan komoditas yang diproduksi agar dapat memenuhi volume kuota MBG dengan harga yang terjangkau.
3. Diperlukan peningkatan ketersediaan sarana prasarana penyimpanan dan pengolahan yang memadai dan memenuhi standar untuk mempertahankan kualitas dan lama simpan produk pertanian, khususnya produk musiman atau cepat busuk.
4. Diperlukan diversifikasi produk olahan pertanian yang memenuhi standar gizi dan diminati penerima manfaat.
5. Diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan petani/nelayan menuju kelembagaan berbadan hukum.

6. Diperlukan peningkatan kemitraan kelembagaan petani/nelayan dengan stakeholder terkait (kelembagaan keuangan, pemasaran, koperasi, SPPG, unit pengolahan)

REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Pemerintah Kabupaten HSS melalui Bagian Hukum menyusun regulasi yang terkait dengan penggunaan produk lokal dalam penyediaan bahan baku MBG di wilayah Kab. HSS.
2. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan, dan instansi yang membidangi penyuluhan pertanian dan perikanan dalam rangka konsolidasi komoditas yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan Program MBG.
3. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi-UKM dan Perindustrian memberikan fasilitasi dan peningkatan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan.
4. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi-UKM dan Perindustrian memfasilitasi pengembangan dan diversifikasi produk olahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang sesuai kebutuhan Program MBG melalui pelatihan dan promosi.
5. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi-UKM dan Perindustrian berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan memfasilitasi peningkatan status kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan agar berbadan hukum.
6. Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, dan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi-UKM dan Perindustrian Peningkatan kemitraan kelembagaan petani/nelayan/pembudidaya ikan dengan stakeholder terkait

DAFTAR PUSTAKA

- Bapanas, 2025. Ringkasan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- BPS Kab. HSS, 2025. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Volume 45. Kandangan.
- Brida Prov. Kalsel, 2024. Kajian Strategi Pengembangan Pertanian Pangan Lokal di Kalimantan Selatan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Brida Prov. Kalsel, 2025. Kajian Pengembangan Corporate Farming dalam Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Kalimantan Selatan. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjarbaru.
- Burnawi, 2009. Identifikasi Jenis Ikan di Suaka Perikanan Danau Talan, Kalimantan Selatan. Buletin Teknik Litkayasa. Vol. 7 (2) 43-46.
- Estiningtyas W, Surmaini E, Suciadini, Susanti E, Mulyani A, Kartiwa B, et al. (2024) Analysing Food Farming Vulnerability in Kalimantan, Indonesia: Determinant factors and Adaptation Measures. PLoS ONE 19(1): e0296262. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0296262>
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2011. Global Food Losses and Food Waste.
- Food and Agriculture Organization (FAO). 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA). <https://kalsel.antaranews.com>. Diakses: 21/02/26.
- <https://portaldata.kkp.go.id>. Diakses tgl 15/02/26.
- Perpres No. 115 Tahun 2025. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
- Rais, A. H.,T. N. M. Wulandari, E. Dharyati, 2018. Aktivitas Penangkapan dan Produksi Ikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan. Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia. Vol. 24 (4) 227-238.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025–2029.